



## **ANALISIS HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

**Rahmadana, Abd. Rahim, Citra Ayni Kamaruddin, Shadry Andriani**

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Negeri Makassar, Indonesia

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana usia, pendidikan, jenis pekerjaan, dan pendapatan berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap. Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode survei. Dalam penelitian ini, 95 responden dari Desa Cipotakari mengisi kuesioner dengan menerapkan metode skala likert. Selanjutnya melakukan analisis data yang mencakup uji instrumen dengan uji validitas dan reabilitas instrument. Adapun uji Rank Spearman diterapkan untuk menguji korelasi dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini mendapatkan bahwa variabel usia memiliki hubungan yang sangat rendah dan tidak signifikan, sedangkan variabel pendidikan, pendapatan dan jenis pekerjaan memiliki tingkat hubungan rendah yang signifikan.

**Kata Kunci:** Usia, Pendidikan, Pendapatan, Jenis Pekerjaan, Partisipasi Masyarakat.

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan desa ialah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pembangunan nasional dengan melibatkan segala dimensi kehidupan dari masyarakat pada wilayah pedesaan. Menurut Ginanjar (Rahma & Niswah, 2022) menyatakan bahwa pembangunan

ialah suatu perubahan yang proses mengarah ke yang lebih baik dengan melakukan upaya secara terstruktur. Tolak ukur keberhasilan dari suatu pembangunan adalah kualitas hidup yang mengalami peningkatan. Sedangkan indikator dari pembangunan sendiri adalah sangat ditentukan dari

---

\*Correspondence Address : newrahmadana1911@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v12i1.2025. 52-62

© 2025UM-Tapsel Press

kualitas sumber daya manusia (Kuswanto & Andreson, 2023).

Selaras dengan Pedoman Pembangunan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 (2014), disebutkan bahwasanya "Perencanaan pembangunan desa ialah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa" (Mendagri, 2013).

Desa diberi kewenangan untuk membangun dan menjalankan pemerintahan mereka sendiri. Kita harus memiliki gagasan tentang pembangunan ekonomi di pedesaan. Ini berarti bahwa suatu model dan pendekatan untuk pembangunan ekonomi desa harus dibuat yang sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat di pedesaan. Pembangunan ekonomi pedesaan memiliki tujuan utama adalah untuk menciptakan suatu lingkungan ekonomi desa. Dalam hal ini berarti penduduknya dapat menjalani kehidupan yang penuh kreatif, sehat, dan dengan harapan masa hidup yang panjang. Untuk mencapai tujuan ini, terdapat indikator yang ditetapkan untuk pembangunan ekonomi pedesaan, salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ialah amanah desentralisasi yang harus dilaksanakan dikarenakan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan desa. Menurut Cohen dan Uphoff, Partisipasi mencakup partisipasi pada proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, penyaluran keuntungan dari program pembangunan, serta partisipasi dalam proses evaluasi program (Nisa & Salomo, 2019). Sehingga partisipasi ini sangat diperlukan demi keberhasilan pembangunan baik di kota maupun di desa, dimana kualitas hidup dan peran

masyarakat di desa sangat besar partisipasinya.

Seberapa besar partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan tergantung pada beberapa unsur. Ada dua jenis faktor - internal dan eksternal - yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Beberapa penelitian sebelumnya juga mengindikasikan bahwa ada faktor-faktor, baik internal maupun eksternal, yang memiliki dampak pada partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, baik itu mendukung atau menghambatnya. Dua kategori faktor dianggap berperan dalam memengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan: faktor internal, yang mencakup stingkat pendidikan, jenis pekerjaan, usia, tingkat penghasilan penduduk, dan durasi tinggal; serta faktor eksternal, yang melibatkan aspek komunikasi serta kepemimpinan (Suroso et al., 2014).

Dari beberapa penelitian sebelumnya, sebagian besar mengemukakan terkait tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa di desa yang dijadikan tempat penelitian terbilang masih sangat rendah. Namun di Desa Cipotakari sendiri, jika dilihat pada data informasi tingkat partisipasi masyarakatnya dalam proses perencanaan pembangunan desa pada indikator sumbangan pemikiran masyarakat sudah terbilang tinggi. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis terkait faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.

Selain itu, dari data pra penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan hasil dari kegiatan

musrembang di Desa Cipotakari adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Realisasi Usulan Musrembang Desa Cipotakari Tahun 2022-2023**

No	Tahun	Jumlah Usulan Musrembang Desa (Kegiatan)	Jumlah Realisasi Usulan Musrembang Desa (Kegiatan)	Persentase Realisasi Usulan (Persen)
1	2022	14	6	43%
2	2023	13	1	8%

Sumber: Kantor Desa Cipotakari dan Kantor Bappeda, 2024.

Data tersebut merupakan data usulan Musrembang serta data realisasi dari tahun 2022 sampai 2023. Data tersebut dapat dilihat dari banyaknya usulan Musrembang, hanya beberapa yang terlaksana. Dengan demikian peneliti berasumsi bahwa salah satu penyebab dari kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan banyaknya usulan yang tidak terealisasi.

Dengan memperhatikan latar belakang, penulis tertarik mengkaji bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang berperan dalam memengaruhi partisipasi tersebut. Dengan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi di desa Cipotakari akan memberikan gambaran mendalam tentang dinamika lokal yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan.

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang kemudian akan diteliti pada penelitian ini yakni, apakah faktor usia, pendidikan, jenis pekerjaan serta pendapatan terdapat hubungan yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap?

Dari perumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor usia, pendidikan, jenis pekerjaan serta pendapatan memiliki hubungan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

Cipotakari Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap.

### Pembangunan Ekonomi

Menurut Katz dalam Sangian et al. (2018) berpendapat bahwa pembangunan ialah proses perubahan situasi yang terencana dari keadaan nasional yang lain menuju pada keadaan nasional dengan nilai lebih tinggi biasanya digambarkan sebagai pembangunan. Pembangunan ialah upaya dalam mengubah situasi yang buruk ke yang lebih baik.

Hardjanto (2011), pembangunan ekonomi dalam konteks tradisional sering diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi, yang umumnya diukur melalui GDP per kapita. Gross Domestic Product (GDP) ialah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu ekonomi selama satu tahun. Meskipun demikian, sebagai konsep yang mandiri, para ekonom telah menggunakan berbagai variabel dan indeks untuk mendefinisikan serta mengukur pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan istilah yang mencakup berbagai aspek, konsepnya dapat dengan mudah dipahami tetapi sulit untuk diukur secara pasti.

Kesimpulan dari penjelasan yang ada di atas adalah bahwasanya pembangunan dianggap sebagai suatu fase yang melibatkan perubahan multidimensional dalam aspek sosial, sikap hidup masyarakat, dan transformasi kelembagaan nasional. Tujuan pembangunan ialah upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perubahan yang terencana dan terkendali.

### Pembangunan Desa

“Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan desa Pasal 1 ayat 9, pembangunan desa adalah upaya

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa” (Kemenkumham RI, 2015).

Menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa ayat (1), “pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan menurunkan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. (Dpr RI, 2014).

Berdasarkan konsep pembangunan desa yang dikemukakan diatas, disimpulkan bahwa pembangunan desa memiliki peran krusial dalam proyek pembangunan nasional, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup serta kehidupan masyarakat desa. Dalam upaya ini, terdapat berbagai tindakan yang melibatkan pembangunan fisik dan non-fisik serta melibatkan sumber daya manusia sebagai kunci pelaksanaan.

### **Perencanaan Pembangunan Desa**

Dalam membangun suatu hal, yang harus dilakukan di awal adalah proses perencanaan. Kalau kita ingin mengkaji permasalahan pembangunan desa kita seharusnya memiliki pemahaman mengenai tahapan perencanaan pembangunan desa yang efektif.

Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 mengenai Desa (Dpr RI, 2014) bahwasanya Pembangunan Desa terdiri dari beberapa tahapan yakni mulai dari tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, hingga tahap Pengawasan.

### **Partisipasi Masyarakat**

Menurut Tawai & Yusuf (2017) partisipasi dapat dijelaskan sebagai keterlibatan dan keikutsertaan warga,

baik secara individu maupun dalam bentuk kelompok sosial atau organisasi kemasyarakatan. Keterlibatan ini didasari oleh kesadaran warga, dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak dipaksa oleh pihak-pihak tertentu. Partisipasi merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah serta potensi yang ada, mengambil keputusan terkait alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah, melaksanakan upaya penanggulangan masalah, dan terlibat dalam evaluasi perubahan yang terjadi (Hajar et al., 2018).

Partisipasi masyarakat dibutuhkan di setiap tahap proses pembangunan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelestarian lingkungan. Yang dalam konteks ini, masyarakat bukan hanya penerima manfaat, melainkan juga menjadi bagian integral dari pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Cohen dan Uphoff (Dwinigrum, 2011) terdapat empat yang membedakan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program atau kebijakan pemerintah. Keempat golongan tersebut mencakup partisipasi pada tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan, tahap pengambilan manfaat serta tahap evaluasi.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode survei. Metode survei dipilih karena dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dari responden yang mewakili populasi dan melakukan analisis statistik pada informasi tersebut untuk menguji hipotesis yang diajukan.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2024, yang akan dimulai dengan observasi lapangan, proposal, pengumpulan data, pengolahan data

serta kesimpulan penelitian. Pada penelitian ini akan diimplementasikan di Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.

Populasi pada penelitian ini yaitu masyarakat desa Cipotakari. Sesuai dengan data yang didapatkan peneliti, populasi di penelitian ini ialah masyarakat Desa Cipotakari yang dikategorikan perwakilan dari komponen-komponen masyarakat yang terlibat dalam Musrembang Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap berjumlah 1919 orang.

Sampel pada penelitian ini ditentukan dengan menerapkan rumus Solvin, sehingga diperoleh sampel sebanyak 95 responden.

Di penelitian ini, peneliti memanfaatkan instrumen penelitian untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan.

Adapun instrumen peneliti yang diterapkan mencakup observasi, wawancara, kuesioner serta dokumentasi.

Penelitian ini memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang langsung diambil oleh responden terpilih dengan melakukan observasi dan wawancara dengan daftar pernyataan (questioner) dengan narasumber Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, serta Anggota Masyarakat.

Adapun data pendukung, menggunakan data sekunder yang sumbernya dari literatur-literatur yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Musrembang dan arsip/laporan lainnya yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat Desa Cipotakari.

Pengujian instrument yang diterapkan ialah uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan untuk analisis data pada analisis tingkat partisipasi masyarakat peneliti menerapkan analisis

kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dalam bentuk pengukuran skala likert.

Adapun untuk menguji data diterapkan uji normalitas sebagai dasar untuk melanjutkan pada analisis korelasi yakni korelasi Rank Spearman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Cipotakari adalah salah satu desa dari empat desa di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Desa Cipotakari adalah desa terjauh dari Kantor Kecamatan Panca Rijang. Terletak di sebelah timur Kecamatan Panca Rijang.

### Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan Desa pada Pengambilan Keputusan

Tabel 2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dalam proses Pembangunan Desa Cipotakari

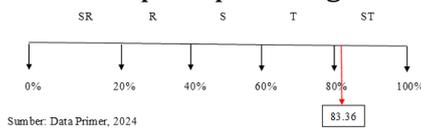
Tingkat Partisipasi	Jumlah Responden	Persen (%)	Total Skor
Sangat Tidak Setuju	0	0	0
Kurang Setuju	0	0	0
Netral	7	7	21
Setuju	65	68	260
Sangat Setuju	23	24	115
<b>Jumlah</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>396</b>

Sumber: Data Primer, 2024.

Berdasarkan data pada tabel di atas, menunjukkan hasil penelitian yang diperoleh dari jawaban responden pada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah sebesar 396. Nilai 396 adalah hasil total dari bidang pengambilan keputusan dari 95 responden. Responden yang memberikan jawaban netral ada sebanyak 7 responden atau 7%, jawaban setuju sebanyak 65 responden atau 68%, dan jawaban sangat setuju sebanyak 23 responden atau 24%. Untuk memperjelas hasil analisis maka diterapkan rumus berikut:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Total Skor})/Y \times 100 \\
 &= 396/475 \times 100 \\
 &= 83.36
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, menunjukkan bahwa secara umum tingkat partisipasi masyarakat pada pengambilan keputusan dalam proses pembangunan Desa Cipotakari tergolong sangat tinggi sebagaimana yang disimpulkan pada tabel skor gabungan hasil dari penelitian mencapai 83.36 atau berada pada interval 80-100. Berdasarkan hasil wawancara, dalam pengambilan keputusan pada perencanaan pembangunan Desa Cipotakari memang melibatkan langsung masyarakat, sehingga masukan dan saran dari masyarakat dapat direalisasikan pada pembangunan desa.



Gambar 1. Tingkat Persentase Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pengambilan Keputusan.

### Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam proses Pembangunan Desa pada Tahap Pelaksanaan

Tabel 3. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam proses Pembangunan Desa Cipotakari pada Tahap Pelaksanaan.

Tingkat Partisipasi	Jumlah Responden	Persen (%)	Total Skor
Sangat Tidak Setuju	0	0	0
Kurang Setuju	35	37	0
Netral	37	39	111
Setuju	22	23	88
Sangat Setuju	1	1	5
<b>Jumlah</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>274</b>

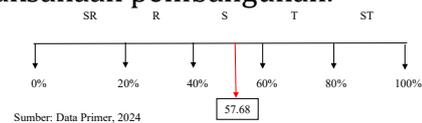
Sumber: Data Primer, 2024.

Berdasarkan data pada tabel di atas, menunjukkan hasil penelitian yang diperoleh dari jawaban responden pada partisipasi masyarakat pada tahap

pelaksanaan adalah sebesar 274. Nilai 274 adalah hasil total pada tahap pelaksanaan dari 95 responden. Responden yang memberikan jawaban kurang setuju ada sebanyak 35 responden atau 37%, jawaban netral sebanyak 37 responden atau 39%, dan jawaban setuju sebanyak 22 responden atau 23%. Untuk memperjelas hasil analisis maka diterapkan rumus berikut:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Total Skor})/Y \times 100 \\
 &= 274/475 \times 100 \\
 &= 57.68
 \end{aligned}$$

Tabel skor gabungan hasil penelitian yang berada pada angka 57.68, atau berada pada rentang 40-59, mengindikasikan bahwa secara keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan proses pembangunan Desa Cipotakari termasuk dalam kategori sedang. Kesimpulan ini didukung oleh perhitungan yang telah dipaparkan di atas. Berdasarkan hasil wawancara, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa pada tahap pelaksanaan masih kurang optimal, dengan banyak masyarakat yang belum terlibat secara aktif dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan.



Gambar 2. Tingkat Persentase Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pelaksanaan.

### Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam proses Pembangunan Desa pada Tahap Pengambilan Manfaat.

Tabel 4. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam proses Pembangunan Desa Cipotakari pada Tahap Pengambilan Manfaat

Tingkat Partisipasi	Jumlah Responden	Persen (%)	Total Skor
Sangat Tidak Setuju	0	0	0
Kurang Setuju	3	3	6

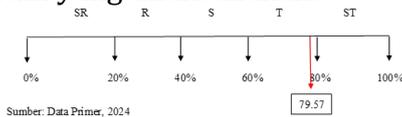
Netral	19	20	57
Setuju	50	53	200
Sangat Setuju	23	24	115
Jumlah	95	100	378

Sumber: Data Primer, 2024.

Berdasarkan data pada tabel di atas, menunjukkan hasil penelitian yang diperoleh dari jawaban responden pada partisipasi masyarakat pada tahap pengambilan manfaat dengan total skor gabungan 378 dari 95 responden. Terdapat 19 responden (20%) yang menjawab dengan kategori netral, 50 responden (53%) menjawab setuju, dan 23 responden (24%) menjawab dengan kategori sangat setuju. Untuk memperjelas hasil analisis maka diterapkan rumus berikut:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Total Skor})/Y \times 100 \\
 &= 378/475 \times 100 \\
 &= 79.57
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan manfaat dalam proses pembangunan Desa Cipotakari dinilai tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh tabel skor gabungan studi, yang berada di angka 79.57, atau di kisaran 60-79. Berdasarkan hasil wawancara, dalam tahap pengambilan manfaat pada perencanaan pembangunan Desa Cipotakari, beberapa masyarakat merasakan hasil positif serta manfaat dari pembangunan yang dilakukan, serta adanya peningkatan output dari program yang dilaksanakan.



Gambar 3. Tingkat Persentase Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pengambilan Manfaat.

**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam proses Pembangunan Desa pada Tahap Evaluasi**

**Tabel 5. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam proses Pembangunan Desa Cipotakari pada Tahap Evaluasi**

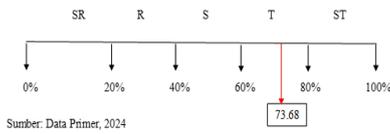
Tingkat Partisipasi	Jumlah Responden	Persen (%)	Total Skor
Sangat Tidak Setuju	0	0	0
Kurang Setuju	1	1	2
Netral	35	37	105
Setuju	52	55	208
Sangat Setuju	7	7	35
Jumlah	95	100	350

Sumber: Data Primer, 2024.

Berdasarkan data pada tabel di atas, menunjukkan hasil penelitian yang diperoleh dari jawaban responden pada partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi dengan total skor gabungan 350 dari 95 responden. Responden terbanyak menjawab setuju sebanyak 52 responden atau 55%, kurang setuju sebanyak 1 responden atau 1%, netral sebanyak 35 responden atau 37%, dan sangat setuju sebanyak 7 responden atau 7%. Untuk memperjelas hasil analisis maka diterapkan rumus berikut:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Total Skor})/Y \times 100 \\
 &= 350/475 \times 100 \\
 &= 73.68
 \end{aligned}$$

Tabel skor gabungan hasil penelitian yang berada di angka 73.68, atau berada di kisaran 60-79, menunjukkan bahwa secara keseluruhan, tingkat partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi proses pembangunan Desa Cipotakari tergolong tinggi. Kesimpulan ini didukung oleh perhitungan yang telah dipaparkan di atas. Berdasarkan hasil wawancara, sejumlah masyarakat berpartisipasi dalam tahap evaluasi perencanaan pembangunan Desa Cipotakari, menilai sejauh mana rencana tersebut diikuti dan sejauh mana hasilnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.



Gambar 4. Tingkat Persentase Partisipasi Masyarakat pada Tahap Evaluasi.

Hasil dari pengujian dari uji validitas, nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel sebesar 0,355 menunjukkan bahwa semua pernyataan untuk variabel partisipasi masyarakat berstatus valid. Sedangkan uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen dalam penelitian ini memenuhi syarat atau dapat diandalkan karena perhitungan SPSS menghasilkan temuan  $0,781 >$   $0,600$ .

Selanjutnya syarat sebelum melakukan analisis korelasi ialah melakukan uji normalitas data. Berdasarkan hasil uji, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 untuk variabel usia dan partisipasi masyarakat yang menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sedangkan sebesar 0,000 untuk variabel pendidikan, pendapatan serta jenis pekerjaan yang menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa nilai residual penelitian ini tidak berdistribusi normal.

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, penelitian ini menggunakan analisis korelasi Rank Spearman. Berikut hasil analisis korelasi Rank Spearman.

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Korelasi Rank Spearman.

Variabel Penelitian	T.H	Correlation Coefficient	Sig.
Usia	-	0.077	0.458
Pendidikan	+	0.320	0.002
Pendapatan	-	0.249	0.015
Jenis Pekerjaan	-	0.275	0.007
N			95

Sumber: Data Diolah SPSS, 2024.

Penelitian terdahulu terkait variabel usia yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti yang ditemukan oleh Slamet dan Sunarti, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam

berbagai kegiatan, termasuk pembangunan, dapat dipengaruhi oleh faktor usia. Menurut mereka, pola pikir dan cara berpikir seseorang cenderung dipengaruhi oleh tahap perkembangan usia (Purwandari & Mussadun, 2016). Dalam konteks ini, masyarakat yang lebih muda cenderung lebih aktif terlibat dalam proses perencanaan pembangunan karena mereka mungkin lebih terbuka terhadap perubahan, lebih termotivasi untuk berkontribusi, dan memiliki energi lebih besar untuk terlibat dalam kegiatan sosial.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah penulis menemukan bahwa di Desa Cipotakari, variabel usia tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Koefisien negatif sebesar 0,077 menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, partisipasi dalam perencanaan pembangunan cenderung menurun, meskipun dengan hubungan yang sangat rendah. Berdasarkan wawancara dengan responden hal ini disebabkan oleh faktor kurangnya waktu karena tanggung jawab lain.

Selain itu, nilai signifikansi sebesar  $0,458 >$   $0,05$  mengindikasikan bahwa secara statistik, hubungan antara usia dan partisipasi dalam pembangunan desa tidak signifikan. Artinya, usia bukanlah faktor utama yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di Desa Cipotakari.

Variabel pendidikan pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Desa Cipotakari. Koefisien sebesar 0,320 dengan tanda positif mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan desa.

Meskipun hubungan yang ditunjukkan rendah, namun tetap ada kecenderungan yang menunjukkan bahwa pendidikan berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Nurbaiti & Bambang, (2017), di mana faktor pendidikan dianggap memiliki peran penting dalam mempengaruhi partisipasi. Pendidikan membantu individu lebih cepat tanggap terhadap perubahan, seperti kemajuan teknologi dan komunikasi, yang dapat mempermudah akses mereka terhadap informasi terkait pembangunan. Pendidikan juga meningkatkan pemahaman tentang proses pembangunan dan cara peran serta kontribusi dapat diberikan secara lebih efektif.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penulis menemukan bahwa meskipun hubungan pendidikan terhadap partisipasi dalam pembangunan cenderung rendah, pengaruhnya tetap signifikan, dengan nilai signifikansi sebesar  $0,002 < 0,05$ . Ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan secara nyata memengaruhi partisipasi masyarakat di Desa Cipotakari.

Hasil penelitian untuk variabel pendapatan menunjukkan bahwa variabel pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Desa Cipotakari, meskipun dengan hubungan yang rendah. Koefisien sebesar  $-0,249$  menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan responden, semakin rendah partisipasi mereka dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini menunjukkan fenomena yang menarik, di mana masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi cenderung kurang terlibat dalam kegiatan pembangunan desa.

Penemuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan

oleh Nurbaiti & Bambang, (2017) di mana tingkat pendapatan memang memengaruhi partisipasi masyarakat. Mereka menjelaskan bahwa masyarakat dengan pendapatan rendah cenderung lebih fokus pada kebutuhan sehari-hari dan mencari nafkah, yang mengurangi kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti perencanaan pembangunan. Tarigan et al., (2019) juga menekankan bahwa keterbatasan ekonomi sering kali membatasi waktu dan sumber daya yang dapat dialokasikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah penulis menemukan bahwa di Desa Cipotakari, pendapatan yang lebih tinggi justru berbanding terbalik dengan tingkat partisipasi. Dengan nilai signifikansi sebesar  $0,015 < 0,05$ , variabel pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat, meskipun arah pengaruhnya negatif.

Hasil penelitian terkait variabel pekerjaan menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Desa Cipotakari, meskipun dengan hubungan yang rendah. Koefisien negatif sebesar  $-0,275$  menunjukkan bahwa jenis pekerjaan, terutama pekerjaan sebagai petani, cenderung mengurangi partisipasi dalam perencanaan pembangunan. Artinya, responden yang bekerja sebagai petani memiliki tingkat keterlibatan yang lebih rendah dalam proses pembangunan dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki jenis pekerjaan lain.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Nurbaiti & Bambang, (2017) yang menyatakan bahwa jenis pekerjaan seseorang dapat memengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan sosial, termasuk pembangunan desa. Mereka

menjelaskan bahwa pekerjaan yang lebih fleksibel dalam hal waktu, seperti pegawai atau profesional, lebih memungkinkan individu untuk menghadiri pertemuan dan terlibat dalam diskusi, dibandingkan dengan pekerjaan yang memerlukan fisik seperti bertani, yang menghabiskan banyak waktu dan tenaga.

Penelitian oleh Tawai & Yusuf, (2017) juga mendukung temuan ini, di mana mereka menemukan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam rapat atau diskusi sering kali disebabkan oleh kesibukan mereka dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Petani, khususnya, mungkin memiliki keterbatasan waktu karena harus mengurus lahan dan panen yang tidak dapat ditunda. Kondisi ini menyebabkan mereka sulit meluangkan waktu untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah penulis menemukan bahwa meskipun jenis pekerjaan berpengaruh terhadap partisipasi, efeknya relatif rendah namun signifikan, dengan nilai signifikansi sebesar  $0,007 < 0,05$ . Hal ini mengindikasikan bahwa di Desa Cipotakari, pekerjaan sebagai petani memiliki dampak nyata dalam menurunkan tingkat partisipasi dalam perencanaan pembangunan. Kondisi ini disebabkan oleh jadwal kerja petani yang ketat dan pekerjaan yang membutuhkan banyak waktu di lapangan, yang membatasi kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pembangunan desa.

## **SIMPULAN**

Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap:

Variabel usia memiliki koefisien negatif sebesar 0,077, yang menunjukkan hubungan sangat rendah dan negatif terhadap partisipasi masyarakat. Seiring bertambahnya usia, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa cenderung menurun. Namun, dengan nilai signifikansi sebesar 0,458 ( $> 0,05$ ), usia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat.

Variabel pendidikan memiliki koefisien positif sebesar 0,320, menunjukkan hubungan yang rendah namun positif antara pendidikan dan partisipasi masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar keterlibatannya dalam perencanaan pembangunan desa. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 ( $< 0,05$ ), pendidikan terbukti berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat.

Variabel pendapatan memiliki koefisien negatif sebesar -0,249, menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin rendah partisipasinya dalam perencanaan pembangunan desa. Meskipun hubungan ini rendah, pendapatan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat, dengan nilai signifikansi sebesar 0,015 ( $< 0,05$ ).

Variabel jenis pekerjaan, terutama pekerjaan sebagai petani, memiliki koefisien negatif sebesar -0,275. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai petani cenderung mengurangi partisipasi dalam perencanaan pembangunan. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,007 ( $< 0,05$ ), jenis pekerjaan memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Dpr RI. (2014). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA*.

Dwinigrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis dan Empirik*. Pustaka Pelajar.

Hajar, S., Tanjung, I. S., Tanjung, Y., & Zulfahmi. (2018). *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Alqi.

Hardjanto, I. (2011). *Teori Pembangunan*. Universitas Brawijaya Press.

Kemenkumham RI. (2015). *Peraturan Menteri Desa dan PDTT No 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa*. 1–10. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/150439/perendes-pdtt-no-3-tahun-2015>

Kuswanto, & Andreson, I. (2023). Model Struktural Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pedesaan di Provinsi Jambi, Indonesia. *Jurnal Populasi Dan Ekonomi*, 115–141.

Mendagri. (2013). Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Nisa, N. K., & Salomo, R. V. (2019). Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p1-7>

Nurbaiti, S. R., & Bambang, A. N. (2017). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility ( CSR ) Factors Affecting Community Participation in the Implementation of Corporate Social Responsibility Program. *Proceeding Biology Education Conference*, 14(1), 224–228.

Purwandari, A. W., & Mussadun. (2016). Perencanaan Pembangunan Kelurahan Di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 11(4), 377. <https://doi.org/10.14710/pwk.v11i4.11548>

Rahma, V. A., & Niswah, F. (2022). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA MELALUI PROGRAM LAMONGAN GREEN AND CLEAN DI DESA SURABAYAN KECAMATAN SUKODADI*

KABUPATEN LAMONGAN.

Sangian, D., Dengo, S., & Pombebing, J. (2018). Pendekatan Partisipatif dalam Pembangunan di Desa Tawang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 4.

Suroso, H., Hakim, A., & Noor, I. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik*. 17.

Tarigan, S. A. R., Hernawati, Warmadewa, I., Anas, A., Yulistianti, A., Aviandhika, S., Muis, A., Suryo, E., & Rafandi, T. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan: Studi Kasus di Kawasan Konservasi Perairan Nusa Tenggara Barat*. Wildlife Conservation Society.

Tawai, A., & Yusuf, M. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan* (Amiruddin (ed.)). Literacy Institute.